

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sumber utama APBN Indonesia didapatkan dari sektor pajak yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pembiayaan negara berasal dari pajak menunjukkan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan pemerintahan sehingga menunjukkan kemandirian negara sesuai cita-cita luhur UUD 1945.¹

Pajak sering kali dianggap beban oleh sebagian masyarakat, hal ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, terlebih dibandingkan dengan tidak memiliki kewajiban membayar pajak, sedangkan bagi pemerintah pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara, yang akhirnya menuntut pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Di dalam Al-Qur'an sumber penerimaan negara selain zakat tidak dibenarkan, karena umat muslim hanya berkewajiban membayar zakat, namun pada kondisi tertentu apabila negara tidak dapat mencukupi pembiayaan negara, negara dapat memungut pajak dengan mengikuti ketentuan *ahlil halli wa aqdi*.

Sistem perpajakan terus disempurnakan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 dan versi Undang-Undang

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), vii.

Terbaru nomor 28 tahun 2009 pajak ialah salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat .

Kota Kediri merupakan daerah otonomi yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah, pemerintah harus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang tercantum pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena itu badan pendapatan, pengelolaan dan aset daerah selaku unsur pelaksana pendapatan daerah diharuskan mampu memformulasi kebijakan agar dapat menggali potensi pendapatan asli daerah secara optimal.

Kota Kediri memang tidak kaya akan obyek wisata alam yang bisa dijadikan magnet untuk menarik pengunjung dari luar kota, Jika dibandingkan Kabupaten Kediri atau kota-kota sekitar. Meski demikian, realitanya kota yang hanya memiliki luas 63,4 KM persegi ini tetap bisa mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor pajak daerah. Perekonomian Kota Kediri beberapa tahun terakhir ini tumbuh begitu pesat dibidang perdagangan dan jasa, dibuktikan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Kota Kediri, diantaranya bioskop, banyaknya hotel-hotel baru yang dibangun di Kota Kediri, begitu juga diikuti usaha Kedai kopi atau Kafe dan mall-mall yang ikut memajukan

perekonomian Kota Kediri. Peningkatan pesat ditahun 2019 tercatat 38.806 usaha dan walikota kediri raih penghargaan sebagai bapak entrepreneur.²

Salah satu dari UMKM yang mendominasi adalah dari sektor bisnis kuliner. Pajak dari bisnis kuliner disebut dengan pajak restoran. Kota Kediri yang hanya mempunyai 3 kecamatan yaitu kecamatan kota, kecamatan pesantren, dan kecamatan mojoroto dapat mencapai target realisasi pendapatan pajak restoran lebih besar dari pada kabupaten kediri yang notabene mempunyai wilayah yang lebih luas yaitu terdiri dari 26 kecamatan, berdasarkan tabel data berikut :

Tabel 1.1
Data Realisasi Pajak Restoran
Tahun 2019

Wilayah	Tahun	Target	Realisasi
Kota Kediri	2019	Rp. 19.050.000.000	Rp. 24.484.962.534,72
Kabupaten Kediri	2019	Rp. 4.750.000.000	Rp. 7.382.777.118.13

Sumber : Dokumentasi BPPKAD Kota kediri³
Dokumentasi PEMDA Kabupaten Kediri⁴

Berdasarkan Tabel 1.1 Pendapatan Kota Kediri dari sektor pajak restoran begitu tinggi di tahun 2019 meskipun masih tercatat 259 wajib pajak restoran terdaftar. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009, pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Pajak restoran ialah pajak yang dipungut berdasarkan pelayanan restoran, yang dalam peraturannya tarif maksimal yaitu 10%. Penerimaan pajak restoran di Kota

² KoranMemo.com,UMKM Berkembang Pesat,walikota Kediri Raih Penghargaan Sebagai Bapak Entrepreneur,diakses 2 juni 2020.

³ Ajeng, staf BPPKAD Kota Kediri,Dokumentasi BPPKAD Kota Kediri, 20 Desember 2019.

⁴ Suciati, staf PEMDA Kabupaten Kediri, Dokumentasi PEMDA Kabupaten Kediri, 15 Juli 2020.

Kediri dinilai sangat berpotensi kedepannya, upaya peningkatan penerimaan pajak restoran terus digalakkan Pemerintah Kota Kediri salah satunya penerapan denda atau sanksi pajak yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kendati seperti itu, masih banyak wajib pajak yang melanggar sehingga pendapatan dari denda pajak restoran tiap tahunnya selalu ada dan bahkan selalu meningkat, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Pendapatan Denda Pajak Restoran
Kota Kediri Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	Rp 0;	Rp 2.342.602;
2	2016	Rp 0;	Rp 4.983.301;
3	2017	Rp 3.652.360;	Rp 5.338.316;
4	2018	Rp 1.000.000;	Rp 6.017.466;
5	2019	Rp. 2.796.360;	Rp. 15.130.535;

Sumber : Data Penerimaan Pajak BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diperoleh gambaran mengenai pendapatan dari denda pajak setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan hasil *pra survey* peneliti dengan staff BPPKAD Kota Kediri sudah dilakukan strategi terkait sosialisasi penghitungan pelaporan dan *audit* laporan keuangan, untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah

belum optimalnya pelaksanaan strategi untuk pajak restoran yang ada di BPPKAD Kota Kediri.

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak daerah dibutuhkan strategi yang harus dilakukan institusi yaitu BPPKAD Kota Kediri sebagai pelaksana dalam bidang pajak daerah. Dalam perpajakan strategi ini disebut dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ialah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek sedangkan Intensifikasi ialah kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan atau penggalan pajak terhadap objek yang sudah terdaftar. Dalam hal ini apakah BPPKAD Kota Kediri sudah melakukan strategi baik ekstensifikasi maupun intensifikasi secara maksimal atau belum ?

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan di atas, maka diharapkan penelitian ini bisa mendeskripsikan akar masalah penyebab mengapa pendapatan dari pajak restoran belum optimal yang dibuktikan dengan data penerimaan dari denda yang terus meningkat. Dan apa yang menjadi penyebab pendapatan dari denda pajak setiap tahunnya meningkat. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pemerintah Kota Kediri Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan realisasi pendapatan pajak restoran di Kota Kediri?

2. Bagaimana strategi pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan dan realisasi pendapatan pajak restoran di Kota Kediri
2. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan pembaca tentang strategi yang dilakukan pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran. Hal ini menjadi penting guna memperkaya khasanah penelitian yang bersinggungan dengan pajak daerah terkhusus pajak restoran.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan dapat menambah pengetahuan serta menambah wawasan tentang ilmu perpajakan.

b. Bagi Akademik

Dunia akademisi memerlukan hasil kajian yang dapat menambah khasanah keilmuan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menambah informasi bagi pengembangan dan pengetahuan khususnya tentang perpajakan.

E. Telaah Pustaka

1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah oleh Ignatius Beny Murti Pratama mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penelitian ini meneliti mengenai perkembangan kontribusi pajak daerah di pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 hingga 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2006 hingga 2008 yaitu: 50,78 %, 51,68%, 45,61%, 48,01%, 47,16%. Setelah menghitung trend tahun 2004 hingga 2008 dan dianalisis dengan menggunakan uji-t maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi pajak daerah.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah obyek penelitian mengenai pajak daerah sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan peneliti menggunakan metode kualitatif, yang kedua, penelitian sebelumnya mengenai perkembangan kontribusi dan peneliti membahas mengenai strategi pemerintah, yang ketiga, di penelitian sebelumnya membahas mengenai pajak daerah secara keseluruhan,

sedangkan peneliti fokus pada strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran.

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal Oleh Dwi Tiyasari Komala Mahasiswi Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini meneliti tentang besarnya kontribusi besarnya pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak asli daerah (PAD), pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara terhadap realisasi pajak hotel dan restoran serta upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak hotel dan pajak restoran.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah obyek penelitian mengenai pajak daerah sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan peneliti menggunakan metode kualitatif, yang kedua, penelitian sebelumnya mengenai perkembangan kontribusi dan peneliti membahas mengenai strategi, yang ketiga, di penelitian sebelumnya membahas pajak hotel dan restoran sedangkan peneliti meneliti fokus pajak restoran.⁵

3. Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (oleh Tumija &Wulan Pemata Sari Institut Pemerintahan Dalam negeri)

⁵ Dwi Tiyasari Komala, “*Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten tegal*”, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2010).

Penelitian ini meneliti mengenai strategi yang dilakukan dinas terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran dan hasil penelitian ialah dengan cara melakukan sosialisasi tentang pajak restoran, mengadakan diklat dan pelatihan, inovasi yang mempermudah pelayanan , meningkatkan mutu dan kinerja aparatur perpajakan.

Persamaan dari penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti mengenai strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian.⁶

4. Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah (Studi Kasus Pada Dinas pendapatan Daerah Kota Malang Th.2011-2015). Oleh Aditya Baskaradji mahasiswa Universitas Brawijaya.

Penelitian ini berfokus kepada laju pertumbuhan dan tingkat efektivitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak dikota malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang pajak restoran. Sedangkan Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya, terletak pada metode penelitian yang digunakan, jika sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, dipenelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif, dan perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti membahas

⁶ Tumija dan wulan Permata Sari, “Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Jawa Barat”, (Jurnal Otonomi Keuangan Daerah Vol.6 No 1 Juni 2018)

mengenai strategi dan di penelitian sebelumnya membahas mengenai evaluasi dan tingkat efektifitas.⁷

5. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros (Oleh Annisa Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Penelitian ini meneliti mengenai kontribusi dari pajak hotel dan resto dalam peningkatan PAD di Kabupaten Maros, hasil dari penelitian ini ialah kontribusi dari penerimaan pajak hotel tergolong rendah karena prosentasi kontribusi jauh dari angka 4%, sedangkan untuk pajak restoran sangat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dikarenakan memiliki prosentasi lebih dari 4%.

Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada variabel yang diteliti penelitian terdahulu meneliti mengenai kontribusi dan peneliti meneliti mengenai strategi , dan objek yang berbeda yaitu yang terdahulu pajak hotel dan restoran dan peneliti hanya pajak restoran saja, persamaan penelitian yaitu sama meneliti mengenai pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak terutama pajak restoran.⁸

⁷ Aditya Baskaradji, “*Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah*”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

⁸ Annisa, “*Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*”, (Skripsi, Universitas UIN Alauddin, 2018)